

Pengelolaan Remitansi Keluarga PMI dalam Peningkatan Ekonomi berbasis Komunitas di Wilayah Pesisir KEK Mandalika

Ratih Rahmawati¹, Taufiq Ramdani¹, Nuning Juniarsih^{1*}

¹Universitas Mataram, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 19, 2024

Revised July 14, 2024

Accepted August 14, 2024

Available online December 31, 2024

Kata Kunci:

Pengelolaan Remitansi; Keluarga Pekerja Migran Indonesia; Wilayah Pesisir

Keywords:

Remittances, Indonesian Migrant Workers Family, Coastal Areas



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Pengelolaan remitansi dilakukan oleh keluarga PMI dalam upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga saat PMI bekerja diluar negeri dan setelah selesai periode bekerja. Rendahnya pengetahuan dalam praktik pengelolaan remitansi membuat masyarakat cenderung konsumtif. Kondisi rumah tangga PMI yang berbeda jarak dan waktu mengakibatkan disharmonisasi dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola pengelolaan remitansi oleh keluarga PMI dalam peningkatan ekonomi berbasis komunitas. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan analisis teori Tindakan Sosial oleh Charles Tilly. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilar pertama program BK TKI yaitu 'pemberdayaan ekonomi keluarga PMI' telah berhasil dilaksanakan. Komunitas ini berhasil menggunakan remitansi untuk dijadikan modal usaha kegiatan ekonomi produktif. Komunitas memproduksi olahan potensi sumber daya alam wilayah pesisir. Hal ini dapat terlaksana karena anggota komunitas atau istri PMI melakukan program kerja Bina Keluarga TKI di

wilayah pesisir KEK Mandalika Kabupaten Lombok Tengah dengan aktivitas penerimaan pengetahuan wirausaha, pelatihan wirausaha, pelatihan menjahit, dan produksi olahan komoditas rumput laut. Kelompok program BK-TKI mengarahkan anggotanya memiliki aktivitas produktif untuk mengelola remitansi. Anggota memiliki akses terhadap relasi diluar desanya, memiliki semangat yang tinggi dan bersilaturahmi. Kendala yang dialami seperti tidak tersedia transportasi, kurangnya SDM dari instansi, pelaksanaan pelatihan dari instansi tidak rutin dilakukan setiap periode dan memiliki jarak waktu yang cukup lama.

ABSTRACT

Remittance management is carried out by PMI families to improve the quality of family welfare when PMI works abroad and after the end of the work period. Low knowledge of remittance management practices makes people tend to be consumptive. The condition of PMI households that differ in distance and time results in disharmony in households. This study aims to determine the PMI families' remittance management pattern in improving the community-based economy. This research was conducted using qualitative research methods with a case study approach using an analysis of social action theory by Charles Tilly. The results showed that the first pillar of the BK TKI program, namely 'economic empowerment of migrant workers' families, has been successfully implemented. This community has successfully used remittances as business capital for productive economic activities. The community produces processed potential natural resources of coastal areas. This can be done because community members or PMI's wives carry out TKI Family Development work programs in the coastal areas of the Mandalika SEZ, Central Lombok Regency, with activities to receive entrepreneurial knowledge, entrepreneurial training, sewing training, and processed production of seaweed commodities. The BK-TKI program group directs its members to have productive activities to manage remittances. Members have access to relations outside their village, have high morale, and stay in touch. Obstacles experienced, such as unavailability of transportation, lack of human resources from agencies, and implementation of training from agencies, are not routinely carried out every period and have a long distance of time.

*Corresponding author

E-mail addresses: nuningjuniarsih@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia merupakan pahlawan devisa negara atau pihak yang menggerakkan perekonomian negara sehingga negara memperoleh keuntungan dalam proses peredaran remitansi yang dihasilkan oleh PMI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pekerja migran telah banyak berkorban untuk keluarga yang tinggal dirumah, untuk mencari nafkah di luar negeri, rela meninggalkan rumah untuk pergi bekerja di Taiwan, Malaysia dan Arab Saudi (Nurchayati, 2010).

Menurut Yuliani & Rasalwati (2020), keluarga yang suami/istri/anak bekerja menjadi pekerja migran memiliki karakteristik peningkatan kesejahteraan keluarga, mampu mengatasi berbagai masalah keluarga, memiliki kondisi psikososial yang tinggi dan memenuhi kebutuhan sosial ekonomi keluarga. Remitansi digunakan oleh masyarakat untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan ekonomi dan sosial keluarga (Habib et al, 2021). Ketahanan ekonomi dan sosial diwujudkan dengan penggunaan remitansi yang sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari, rumah, kendaraan, acara keagamaan, pendidikan anak dan bisnis (dengan jumlah dibawah 50%). Oleh karena itu, bagi keluarga PMI yang dapat mengelola remitansi dengan baik maka menggunakannya untuk keperluan bisnis, namun jumlahnya lebih sedikit daripada keluarga PMI yang memiliki konsumsi rumah tangga yang tinggi.

Keluarga PMI tidak jarang memiliki pemahaman yang rendah dalam praktik pengelolaan remitansi sehingga cenderung konsumtif. Istri yang merupakan ibu rumah tangga menghabiskan remitansi untuk kebutuhan konsumsi lebih banyak daripada istri bekerja (Zulkifli et al, 2020). Masyarakat memiliki kesulitan dalam mengelola bisnis ketika telah pensiun dari bekerja di luar negeri meskipun dikelola bersama keluarga di negara asal (Nugroho et al, 2021). Hal ini disebabkan karakter masyarakat memiliki tidak memiliki peralatan dan sedikit modal usaha, mayoritas purna PMI tidak siap dengan perubahan ketika di daerah asal dan tidak sabar dalam memperoleh hasil.

Menurut (Zheng & Musteen, 2018), pengiriman uang atau remitansi mengarah pada pembentukan aktivitas wirausaha karena kebutuhan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Masyarakat tipe ini adalah mereka yang mencari peluang berwirausaha. Kendala aktivitas wirausaha yang dilakukan oleh PMI adalah lokasi operasi bisnis terletak jauh dari akses jalan utama, kekurangan modal dalam penyediaan alat sarana prasana / transportasi, dan bergantung pada pemasok sumber daya yang dibutuhkan (Yuniarto, 2019). Persoalan lokasi bisnis mengakibatkan kendala untuk mencapai pusat perdagangan. Hal ini menjadi hambatan karena bergantung pada pemasok bahan produksi.

Pola penggunaan remitansi secara keseluruhan, keputusan untuk investasi, keputusan pekerja migran kembali ke daerah asal, dan kondisi atau status rumah tangga ditentukan oleh latar belakang sosial ekonomi masing-masing masyarakat dan pilihan yang tersedia (Puri & Ritzema, 1999). Perbedaan status sosial ekonomi dan pemilihan keputusan dalam penggunaan remitansi dapat mempengaruhi kondisi rumah tangga PMI yaitu menghasilkan keharmonisan atau keretakan/konflik rumah tangga. Rumah tangga PMI berpotensi konflik dipicu oleh masalah penggunaan remitansi untuk kebutuhan konsumtif menimbulkan konflik destruktif sehingga berpotensi terjadi perceraian (Suryadi et al, 2022) Dengan demikian, rumah tangga PMI harmonis adalah mampu mengelola keuangan. Apabila remitansi/keuangan PMI tidak dikelola dengan bijak dan cenderung konsumtif maka memicu konflik menuju keretakan rumah tangga atau perceraian.

Terdapat upaya dari berbagai pihak untuk mendampingi masyarakat/keluarga pekerja migran. Di Filipina, sedikit pekerja migran yang berwirausaha sehingga pendampingan tenaga ahli kewirausahaan dan pengembangan usaha dilakukan untuk memberdayakan keluarga hingga mencapai mandiri (United Nations Conference on Trade and Development, 2013). Perlindungan tidak hanya dikhususkan bagi PMI, namun dibutuhkan pula bagi keluarga PMI supaya kondisi rumah tangga stabil karena pasangan bekerja di luar negeri (Utami, 2018). Pemerintah memiliki peran utama dalam pelaksanaan perlindungan bersama masyarakat, hal ini menjadi krusial karena keluarga pekerja migran memiliki posisi yang rentan. Salah satu program pendampingan keluarga PMI adalah Program Bina Keluarga (BK-TKI) dengan kegiatan kewirausahaan (Bachtiar & Prasetyo, 2015). Keluarga migran menerima pendampingan dari lembaga pemerintah supaya berdaya dan sejahtera dengan mengelola remitansi dan terhindar dari kondisi rentan, kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan pelatihan kewirausahaan hingga pendampingan dalam pelaksanaan bisnis.

Pemberdayaan keluarga PMI dilakukan supaya PMI tidak kembali bekerja ke luar negeri, pembinaan dan pendampingan dilakukan oleh pemerintah dan NGO sehingga keluarga bisa memulai usaha produktif di rumah masing-masing (Aemanah, 2017). Program Bina Keluarga TKI adalah program yang melindungi keluarga PMI, Meskipun dalam pelaksanaan diberbagai wilayah di Indonesia belum efektif karena terbelang baru (Puspawati, 2019). Program ini dapat membantu masyarakat dalam mengelola perekonomian keluarga PMI dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2020),

masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Tengah memiliki kerentanan pada keluarga PMI dalam pembentukan stabilitas ekonomi rumah tangga karena ketidakmampuan mengelola remitansi. Program Keluarga Bina TKI berwujud pendampingan bagi keluarga PMI untuk memberikan pengetahuan kewirausahaan bagi peningkatan taraf ekonomi masyarakat pesisir. Program kerja ini berbentuk komunitas untuk menghasilkan aktivitas pemberdayaan ekonomi sebagai tindakan kolektif untuk mencapai peningkatan ekonomi keluarga PMI.

Tindakan kolektif diartikan sebagai konsep yang luas namun sederhana dalam pengertiannya, anggota atau unsur bergabung untuk mencapai tujuan bersama dan menghasilkan tindakan kolektif atau produk sosial. Anggota masyarakat membuat rancangan bersama, melakukan kegiatan sosial bersama, melawan sistem bersama, dan lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan *'collective action itself is a broad but simple concept; it includes all the ways in which people join their efforts in pursuit of common ends'* (Tilly, 1977). Tindakan kolektif yang dihasilkan kelompok pelaksana program BK-TKI memiliki dampak perubahan yang signifikan pada kehidupan anggotanya karena anggota melakukan kegiatan dalam program kerja BK-TKI untuk mencapai tujuan dari ketiga pilar program,

Selanjutnya, tindakan sosial merupakan gerakan sosial yang terjadi dalam upaya mengadakan perubahan melalui interaksi sosial yang terkadang mengandung perlawanan dan sifatnya berkelanjutan antar anggota (Tilly, 1985). Tindakan kolektif untuk menuju perubahan yang telah dirancang secara bersama-sama, tindakan ini hasil interaksi sosial, berisi perlawanan dan berkelanjutan.

Menurut (Tilly, 2004), tindakan kolektif ini memiliki 5 komponen yang seringkali digunakan untuk menganalisis konflik kepentingan. Unsur-unsur ini dijelaskan sebagai berikut: (1) kepentingan, yaitu anggota kelompok atau agen perubahan sosial memperoleh keuntungan atau kerugian bersama akibat berinteraksi dengan populasi atau kelompok lain, (2) organisasi, yaitu wadah yang menjadi identitas umum dan berisi struktur pemersatu agen atau anggota kelompok, (3) mobilisasi, yaitu kekuatan atau potensi dari tingkat sumber daya yang berada dalam kendali kolektif anggota kelompok, (4) kesempatan, yaitu tujuan dari gerakan sosial dikatakan berhasil apabila kesempatan dan momentum tepat dilakukan oleh agen, (5) tindakan sosial, yaitu aksi atau tindakan yang berisi petunjuk untuk mencapai kepentingan agen atau anggota yang ditujukan untuk kelompok lain.

Ketahanan keluarga TKI dapat dicapai dengan pengelolaan remitansi yang efektif, namun, kendala yang dialami oleh masyarakat pesisir Kabupaten Lombok Tengah adalah ketidakmampuan dalam mengelola remitansi sehingga PMI harus pergi keluar negeri untuk bekerja di periode selanjutnya dan keluarga PMI menjadi kelompok masyarakat rentan. Menurut Aziz (2022), di Kabupaten Lombok Tengah, perekonomian masyarakat stabil di masa lalu karena memiliki hasil dari pertanian, namun, untuk saat ini, kebutuhan masyarakat semakin meningkat namun tidak semua memiliki lahan pertanian dan kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan. Kondisi ini membuat masyarakat pesisir pergi bekerja keluar negeri dan keluarga PMI perlu mengelola remitansi dengan baik.

Menurut Wijaya & Setiyono (2020), Program Desbumi menjadi komunitas bagi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah sehingga memiliki aktivitas setelah kembali ke daerah asal sekaligus aktivitas produktif bagi keluarganya dengan menggunakan remitansi melalui pemberdayaan ekonomi dan mengelola potensi lokal. Program kerja ini salah satunya bertujuan untuk mendorong masyarakat menjadi lebih berdaya, menyediakan sarana dan prasarana untuk menggali potensi lokal, dan mendampingi masyarakat dalam melakukan praktik keahlian manajemen bisnis dan keuangan/remitansi. Kabupaten Lombok Tengah memiliki beberapa program kerja hasil implementasi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang bertujuan memberdayakan pekerja migran dan keluarganya.

Penelitian ini dilakukan di wilayah pesisir KEK Mandalika Kabupaten Lombok Tengah karena menjadi wilayah yang memiliki angka tertinggi kedua PMI yang bekerja ke luar negeri di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah 5,644 individu pada tahun 2023 (NTB Satu Data, 2023). Jumlah ini menjadi angka kedua tertinggi sehingga mendapat perhatian lebih dari berbagai stakeholder, disamping itu, keberadaan PMI yang menghasilkan remitansi akan memberikan sumbangan devisa negara dan mengatasi masalah pengangguran (Khoirudin et al, 2023). Terlebih PMI yang kembali ke daerah asal dapat melakukan pemberdayaan ekonomi di daerah asal dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, memberikan stabilitas ekonomi yang berbanding lurus dengan keharmonisan rumah tangga, dan menyediakan aktivitas produktif (bisnis rumahan) untuk masyarakat disekitar tempat tinggal. Oleh karena itu, perlu penanganan khusus dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, NGO, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada PMI dan keluarga yang ditinggalkan bekerja.

Penelitian ini bertujuan mengetahui pola pengelolaan remitansi berbasis komunitas yang dilakukan oleh keluarga PMI dengan implementasi program kerja BK-TKI untuk mengatasi masalah rumah tangga PMI untuk peningkatan ekonomi khususnya dalam upaya stabilitas ekonomi keluarga. Kebijakan yang telah

ditetapkan pemerintah pusat diimplementasikan bersama pemerintah daerah dan ketua pelaksana sebagai motor penggerak pada program kerja Bina Keluarga TKI di Kabupaten Lombok Tengah. Urgensi penelitian ini adalah teori tindakan kolektif oleh Tilly digunakan untuk menganalisis pengelolaan remitansi berbasis komunitas atau pemberdayaan yang dilakukan secara kolektif oleh keluarga PMI dalam organisasi/program kerja BK-TKI. Pelaksanaan program kerja ini dilakukan melalui komunitas yang telah dibentuk sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dengan pilar pemberdayaan ekonomi keluarga PMI yang terdiri dari mentoring, pelatihan, hingga produksi olahan potensi sumber daya alam wilayah pesisir.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data mengenai aspek-aspek tidak berwujud seperti norma sosial, posisi sosial ekonomi, peran gender, etnis dan agama (Gofe et al, 2022). Peneliti mendapatkan informasi mengenai data-data abstrak yang diperoleh dari kehidupan keluarga pekerja migran dan pengelolaan remitansi berbasis komunitas yang digambarkan secara deskripsi tekstual secara mendalam. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena dan mencari makna yang terdapat dalam fenomena pengelolaan remitansi oleh keluarga PMI di wilayah pesisir KEK Mandalika Kabupaten Lombok Tengah, peneliti mengeksplorasi masalah sosial pada masyarakat pesisir, sehingga peneliti dapat mengetahui fenomena secara mendalam mengenai problematika subjek penelitian untuk dianalisis dengan teori sosial yang sesuai. Hal ini untuk menemukan posisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dalam realita sosial sebagai anggota komunitas program kerja BK-TKI. Penelitian kualitatif ini sesuai dengan pendapat Creswell & Creswell (2018), bahwa penelitian menggunakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang tersirat dalam fenomena yang memuat masalah social dan kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan penelitian adalah studi kasus sebagai strategi untuk memperoleh data dengan jawaban pertanyaan “bagaimana”, “mengapa”, dan “apa” (Yin, 2018). Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk memperoleh data dengan lengkap dan valid yang menjawab pertanyaan penelitian, pendekatan ini sebagai strategi untuk mendapatkan data mengenai penjelasan fenomena sosial mengenai proses terjadinya suatu fenomena, alasan terjadinya fenomena (tindakan sosial masyarakat), dan deskripsi mengenai fenomena social yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini memiliki karakteristik adalah data yang diperoleh menyeluruh menjawab permasalahan penelitian sehingga data dapat disusun secara rinci untuk diubah menjadi narasi penelitian.

Alasan peneliti menggunakan desain penelitian ini untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mengetahui fenomena pengelolaan remitansi oleh masyarakat pesisir berbasis komunitas pada program kerja BK-TKI di wilayah pesisir KEK Mandalika Kabupaten Lombok Tengah, desain penelitian ini membuat peneliti mendapatkan data dengan mengeksplorasi perilaku atau tindakan sosial keluarga PMI dalam melaksanakan program kerja BK-TKI untuk mencapai kesejahteraan keluarga migran melalui pemberdayaan ekonomi. Setelah mengeksplorasi data dalam realita social kemudian data tersebut ditransformasi dalam bentuk narasi dari observasi di lapangan, hasil wawancara menggunakan pedoman wawancara, dan dokumentasi hasil pengalaman informan mengenai fenomena social dari kegiatan yang dilakukan oleh keluarga PMI.

Studi kualitatif ini menggunakan teknik observasi dengan pengamatan yang tajam, wawancara untuk memperoleh petunjuk atau jawaban dari informan, dan dokumentasi dari sumber-sumber terkait (Cropley, 2023). Peneliti melakukan observasi dengan mengamati secara langsung dan mengamati dengan tajam untuk mendapatkan data yang valid mengenai fenomena social yang terjadi pada masyarakat pesisir. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan mengajukan pertanyaan kepada informan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, sehingga mendapatkan makna dari permasalahan sosial. Terakhir, peneliti melakukan pengumpulan data pelengkap dengan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan data atau dokumen dari sumber lain yang relevan dengan permasalahan penelitian mengenai pengelolaan remitansi oleh keluarga PMI berbasis komunitas di wilayah pesisir KEK Mandalika Kabupaten Lombok Tengah.

Subjek penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Ketua BK-TKI Kabupaten Lombok Tengah sebagai informan kunci, anggota BK-TKI Kabupaten Lombok Tengah (Istri PMI) sebagai informan utama, dan informan pendukung adalah Kepala Desa. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman dan fenomena mengenai perilaku keluarga PMI dalam mengelola remitansi untuk meningkatkan status ekonomi di masyarakat dengan basis komunitas melalui program BK-TKI. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman dan fenomena mengenai perilaku keluarga PMI dalam mengelola remitansi untuk meningkatkan status ekonomi di masyarakat dengan basis komunitas.

Fenomena dikemas dalam gambaran yang reduksionistik dan mekanistik dengan kerangka kerja analisis data interaktif seperti reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi (Miles et al, 2014). Peneliti menganalisis data dengan sistem interaktif dan kontinyu sehingga memperoleh hasil/data yang jenuh (berulang). Peneliti melakukan tahap reduksi data dengan menggolongkan data sesuai masing-masing sumber, menyederhanakan dan mengubah/mentransformasi data menjadi data berbentuk narasi dari awal penyusunan laporan hingga proses penelitian berakhir. Selanjutnya, peneliti menyajikan data yang telah dikelompokkan per sub bahasan menjadi narasi. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi data, penarikan kesimpulan menjadi tahap terakhir dalam penyajian data yang berisi premis-premis penting atau hasil gagasan keseluruhan penelitian, hal ini dilakukan karena peneliti telah menguji validitas data setelahnya mendapatkan kesimpulan data mengenai pengelolaan remitansi oleh masyarakat pesisir berbasis komunitas dengan melaksanakan program BK-TKI untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi dan sebagai wujud pelaksanaan pilar pertama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah pusat memberikan solusi dalam mengurangi resiko keretakan rumah tangga PMI dan tindakan konsumtif dalam pengelolaan remitansi, bersama pemerintah daerah, dan perwakilan yang menjadi motor penggerak program. Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Pasal 1 Tentang Panduan Umum Bina Keluarga TKI. Program kerja ini memiliki tiga pilar, salah satunya adalah pilar pemberdayaan ekonomi keluarga PMI. Program ini berwujud mentoring di setiap wilayah termasuk wilayah pesisir KEK Mandalika, berisi pertemuan rutin bulanan, pelatihan & produksi olahan potensi sumber daya alam di sekitar wilayah pesisir (rumput laut), serta pelatihan menjahit untuk produksi bros dan tas wanita.

Menurut informan NH, masyarakat pesisir dikumpulkan dalam wadah/komunitas/kelompok program kerja BK-TKI sehingga bertemu dengan anggota lain yang memiliki kondisi yang sama, kegiatan dalam komunitas ini memperkecil kemungkinan melakukan kegiatan negatif dan memberikan kesempatan anggota untuk saling memberi dukungan atas kondisi sebagai istri PMI yang sedang bekerja keluar negeri. Program kerja ini untuk mencapai perkembangan dalam kehidupan istri PMI baik perkembangan kualitas hidup dan perkembangan usaha produktif atau bisnis atau kewirausahaan. Anggota menerima pengetahuan dan wawasan mengenai kewirausahaan sehingga dapat mengelola remitansi untuk meningkatkan perekonomian keluarga PMI di wilayah pesisir.

Salah satu pilar program BK-TKI berbentuk kegiatan pemberdayaan. Menurut ZA (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat), menyatakan bahwa masyarakat pesisir menerima pengetahuan wirausaha pada pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pelaksanaan produksi olahan komoditas rumput laut, serta pelatihan menjahit untuk pembuatan bros dan tas wanita. Kegiatan pada pilar pertama program BK-TKI mengarahkan keterampilan wirausaha supaya masyarakat pesisir dapat mengelola remitansi dengan bijak dan efektif setelah mendapatkan pengetahuan pada program BK-TKI Kabupaten Lombok Tengah.

Pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan masyarakat pesisir menjadi salah satu wujud program BK-TKI untuk meningkatkan produktifitas ekonomi pada anggota kelompok, hal ini merupakan upaya kelompok progam BK-TKI dan instansi dalam menciptakan pemahaman dan keterampilan masyarakat pesisir mengenai pembuatan produk bros, tas tangan, dan dompet wanita dengan kain tenun. Sehingga, kain tenun diinovasi dan dibuat menjadi produk-produk yang bisa dipakai/dikonsumsi sendiri atau dijual.



Gambar 1. Kegiatan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan Sirkuit Mandalika di Dusun Ujung lauq Desa Kuta, Kec. Pujut - Lombok Tengah

Pilar pertama program BK-TKI telah terlaksana di wilayah pesisir KEK Mandalika dengan melakukan aktivitas produktif yang bermanfaat bagi peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat pesisir. Menurut informan JU, Pemerintah daerah memberikan pengetahuan atau materi mengenai wirausaha dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam di sekitar wilayah pesisir dan dibersamai dengan upaya peningkatan keahlian masyarakat pesisir keluarga PMI untuk mengolah sumber daya alam pesisir dan membuat produk kerajinan tangan untuk wanita yang dapat dijadikan produk dagangan atau dipakai sendiri.

Program BK-TKI didukung oleh berbagai pihak, tidak hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun, ketua kelompok BK-TKI. Menurut informan NH, mentoring oleh ketua dilakukan dengan penyampaian materi dan pengetahuan mengenai wirausaha dan perlindungan bagi istri dan anak PMI dalam bentuk pertemuan bulanan dan arisan yang dilakukan oleh istri PMI. Pemahaman kewirausahaan dapat mencapai tujuan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian keluarga apabila ditindaklanjuti, keluarga PMI melanjutkan aktivitas ini menjadi bisnis pribadi di rumah tangga masing-masing. Selain itu, bisnis yang dilakukan oleh masyarakat pesisir seperti menjual barang dagangan seperti sembako dan makanan ringan atau toko kelontong.



Gambar 2. Pertemuan Rutin Bulanan Kelompok BK-TKI Kab. Lombok Tengah

Kegiatan ini terlaksana dengan baik karena keluarga PMI menerima materi wirausaha dari program BK-TKI dan menggunakan remitansi untuk dijadikan modal usaha, sehingga remitansi dapat diputar untuk kegiatan ekonomi produktif. Dalam hal ini, menurut RO (Ketua BK-TKI), menyatakan bahwa program BK-TKI Kabupaten Lombok Tengah telah berhasil melaksanakan pilar pertama yaitu pemberdayaan ekonomi keluarga PMI, kegiatan pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan dan pembentukan kelompok produksi olahan komoditas rumput laut. Kelompok BK-TKI mengambil kesempatan ini untuk melakukan pelatihan pengolahan rumput laut menjadi kerupuk. Ketua kelompok mendapatkan pengetahuan dari P2WKSS, kemudian dibagikan ketua kelompok untuk anggota BK-TKI di wilayah pesisir.

Menurut RO (Ketua BK-TKI), Kelompok produksi pengolahan rumput laut ini dibuat kelompok pemekaran, sehingga menjadi dua kelompok, kelompok pertama memproduksi olahan rumput laut dan kelompok kedua memproduksi kue tradisional khas Sasak. Usaha produktif atau bisnis yang dilakukan oleh masyarakat pesisir diupayakan untuk pengoptimalan pengolahan sumber daya alam disekitar tempat tinggal, atau produksi rumahan dengan modal kecil, atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Selain itu, kelompok juga melaksanakan pemberdayaan dengan membuat kelompok menjahit sehingga pengurus dapat lebih mudah untuk memfasilitasi alat mesin jahit secara kolektif untuk anggota.

Menurut informan JU, pada pelaksanaan kelompok menjahit, masyarakat pesisir keluarga PMI memperoleh pengetahuan dalam proses menjahit baju, bros, dan tas wanita. Setelah pelatihan selesai, masyarakat dapat mempraktekkan keahlian menjahit tersebut untuk membuka bisnis atau usaha di kelompok atau di rumah masing-masing, apabila terdapat masyarakat yang memesan baju atau produk jahitan lain maka dapat menambah pendapatan masyarakat pesisir dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari keluarga PMI. Menurut informan MA, pelaksanaan program ini memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut: pelaksanaan pelatihan wirausaha dari instansi (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) tidak rutin dilakukan setiap periode, namun, ada jarak waktu yang cukup lama sekitar 1 atau 2 tahun sekali. Hal ini disebabkan, komunikasi antara kelompok BK-TKI dengan instansi tidak intensif. Dengan kata lain, pelaksanaan program tidak dilakukan evaluasi dan tidak ada waktu yang ditentukan untuk keberlanjutan pelatihan dari instansi.

Selanjutnya, menurut RO (Ketua BK-TKI), instansi tidak menyediakan perwakilan/penyuluh untuk menjadi pembina di kelompok BK-TKI, atau dengan kata lain, kurangnya SDM dari instansi bagi masyarakat pesisir anggota BK-TKI. Pembina dari instansi dapat memberikan pengetahuan baru setiap pertemuan, mengevaluasi kinerja kelompok atau sekedar memantau kondisi kelompok, namun hal tersebut tidak disediakan oleh pihak instansi terkait. Sehingga membutuhkan kinerja lebih dari ketua kelompok untuk pelaksanaan program, ketua kelompok yang menjadi motor penggerak untuk melaksanakan pelatihan, memimpin kelompok usaha produktif, dan mengumpulkan anggota.

Menurut informan NH, masyarakat pesisir menerima pesanan kerupuk rumput laut dan kue tradisional khas Sasak untuk kelompok hanya musiman saja, dalam hal ini ketika menyambut hari raya Idul Fitri atau momen lebaran, masyarakat sekitar melakukan pembelian meskipun tidak terlalu banyak. Hal inilah yang menjadi hambatan masyarakat pesisir keluarga PMI dalam mengembangkan usahanya salah satunya karena rendahnya peminat dan lemahnya pemasaran. Selanjutnya, kendala yang dialami oleh masyarakat pesisir adalah tidak memiliki kendaraan bermotor sehingga mengalami kesulitan dalam menempuh lokasi pertemuan. Oleh karena itu, anggota perlu melakukan koordinasi dengan anggota lain. Kondisi ini mengakibatkan anggota tidak ingin menghadiri pertemuan yang diadakan oleh instansi atau kelompok BK-TKI

Kelebihan pelaksanaan program ini bagi masyarakat pesisir, yaitu masyarakat dapat memperoleh pelatihan dari instansi-instansi terkait sehingga memperoleh pengetahuan dan wawasan baru mengenai kewirausahaan, selain itu, masyarakat memperoleh relasi diluar desanya, anggota dapat menjalin relasi dengan pemerintah daerah setempat sehingga memiliki jangkauan pemasaran yang lebih luas apabila ditindaklanjuti. Selanjutnya, menurut informan SA, kegiatan produktif dalam program BK-TKI dapat mendorong masyarakat pesisir keluarga PMI untuk mengelola remitansi menjadi modal usaha dengan melakukan usaha atau bisnis di rumah masing-masing, hal ini untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Anggota memiliki rutinitas yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat yang bukan anggota, yaitu aktivitas selain melakukan urusan domestik. Menurut informan JU, hal ini menimbulkan dampak yang besar bagi diri anggota sebab pasangan dan anak PMI memiliki tekanan psikologis dan mentalitas yang berbeda dengan keluarga yang suami tinggal di rumah sehingga dapat mengurangi tindakan konsumtif, mengurangi dorongan perilaku negatif yang merugikan dan mengurangi tingkat kerentanan rumah tangga PMI. Menurut informan SA, pilar pertama mendorong anggota untuk mengelola remitansi menjadi modal usaha setelah menerima pengetahuan dan keterampilan dari program BK-TKI. Anggota terdorong untuk mengalokasikan sebagian remitansi dari suami yang bekerja diluar negeri untuk menjadi usaha produktif atau bisnis atau UMKM di rumahnya masing-masing. Hal ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan daya tahan tubuh secara fisik dan psikologis karena memiliki ketahanan dalam melakukan kegiatan produktif secara kolektif di kelompok dan secara individu. Disamping itu, mengurangi resiko suami kembali bekerja ke luar negeri. Hal ini membuat rumah tangga menjadi lebih sejahtera dan anggota keluarga memiliki fisik dan mentalitas yang sehat sehingga rumah tangga menjadi lebih stabil karena memiliki dukungan kelompok. Oleh karena itu, dapat dikatakan pilar pertama BK-TKI telah terlaksana.

Tindakan sosial berwujud gerakan sosial yang anggota kelompok sosial dan unsur-unsur yang tergabung mencapai tujuan bersama menghasilkan tindakan kolektif atau produk sosial (Tilly, 1977). Tindakan kolektif ini berbentuk kelembagaan (Program BK-TKI) untuk istri dan anak PMI supaya memperoleh perlindungan dan pendampingan dari pemerintah sehingga mencapai sasaran program, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi dengan mengelola remitansi. Menurut Utami (2018), program kerja ini dibentuk oleh pemerintah untuk mendorong masyarakat supaya dapat berdampingan secara kolektif menangani masalah TKI dan keluarganya.

Perubahan yang dihasilkan oleh anggota adalah pengembangan organisasi berbasis komunitas yang mendorong masyarakat dalam menggunakan remitansi sehingga anggota dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi (Octaviani, 2015). Tindakan sosial yang berbentuk gerakan sosial menghasilkan perubahan melalui interaksi sosial antar anggota, mengandung perlawanan dan berkelanjutan (Tilly, 1978). Program berbasis komunitas menjadi alat bagi masyarakat untuk mengurangi resiko penggunaan remitansi yang tidak efektif menjadi lebih efisien, masyarakat berupaya menjadi lebih berdaya dan tidak bertindak konsumtif.

Interaksi sosial yang dilakukan secara berkelanjutan mendorong masyarakat dalam mencapai tujuan program melalui kegiatan rutin pada masing-masing kelompok setiap bulannya di wilayah pesisir KEK Mandalika. Organisasi (LSM) di Kabupaten Cilacap membuat program pemberdayaan bagi anggotanya sehingga menciptakan interaksi untuk mencapai tujuan program yaitu peningkatan kemampuan purna-PMI dan keluarganya melalui pemberdayaan ekonomi, TIK, hukum, dan mental-

psikologis, karena pemahaman anggota mengenai pengelolaan remitansi minim atau kurang (Saleh et al, 2022). Dalam hal ini, program pemberdayaan pada organisasi yang dilaksanakan oleh anggota (calon PMI/PMI/purna-PMI) untuk meningkatkan kualitas hidup anggota sehingga menjadi sejahtera, program ini dilaksanakan melalui interaksi diwujudkan dengan kebersamaan dan partisipasi antar anggota.

Komponen penyusun tindakan kolektif sesuai untuk menganalisis fenomena yang didasari perbedaan kepentingan, unsur tersebut antara lain: kepentingan, organisasi, mobilisasi, kesempatan, dan tindakan sosial (Tilly, 2004). Menurut Ancelovici (2021), menjelaskan terdapat perbedaan kepentingan yang mendasari masyarakat untuk melakukan tindakan kolektif. Dalam hal ini, melalui pemberdayaan ekonomi pada program BK-TKI di wilayah pesisir sehingga dapat mengurangi angka PMI yang bekerja di luar negeri, masyarakat pesisir ingin menambah pengetahuan dan keterampilan wirausaha, mengembangkan bisnis melalui pengelolaan remitansi, dan mengembangkan relasi ke luar wilayahnya. Disamping itu, dapat mengurangi disharmonisasi rumah tangga PMI.

Selanjutnya, masyarakat pesisir mengimplementasikan program BK-TKI yang diwujudkan dalam organisasi atau kelompok yang menjadi identitas bagi keluarga PMI yaitu kelompok BK-TKI Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini sesuai dengan salah satu komponen tindakan kolektif, yaitu organisasi. Menurut Tilly (2004), untuk menghasilkan tindakan kolektif diperlukan wadah yang menjadi identitas umum dan berisi unsur atau struktur untuk mempersatukan agen-agen atau anggota kelompok untuk mencapai tujuan kelompok atau tindakan kolektif. Mantan buruh migran di Kabupaten Wonosobo melakukan pemberdayaan secara kolektif memiliki wadah untuk menaungi anggota baik dari lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah (Arifiartiningsih, 2016). Anggota kelompok dikumpulkan berdasarkan latar belakang yang sama yaitu mantan PMI yang kembali ke daerah asal ingin menggunakan remitansi untuk usaha produktif atau bisnis setelah kembali dari luar negeri. Sehingga organisasi merupakan pemersatu agen karena menjadi wadah untuk melakukan perubahan dalam suatu gerakan sosial (Tilly, 1985).

Selanjutnya, mobilisasi agen pelaku tindakan kolektif adalah terkait sumber daya atau aspek produksi yang dimiliki agen dalam kendali kolektif (Tilly, 1978). Organisasi memobilisasi partisipan untuk menjadi anggota karena agen/partisipan tersebut membawa sumber daya atau potensi untuk mendukung keberadaan organisasi dan terjadi perubahan (Tilly dalam Lampe, 2018). Hal ini berarti mobilisasi pada agen ditujukan untuk mobilisasi sumber daya bagi organisasi. Menurut Sjaifirah et al (2021), program BP3TKI Provinsi Jawa Barat membuat anggota memiliki aktivitas produktif (tindakan kolektif) dengan mengelola remitansi melalui pemberdayaan ekonomi atau pelatihan kewirausahaan, sehingga masyarakat melakukan mobilisasi sumberdaya atau *resources* seperti ide, nilai, cerita, simbol, makna, lembaga, kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan program kerja di organisasi sehingga mencapai tujuan.

Lampe (2018) menjelaskan bahwa organisasi menjadi wadah untuk proses mobilisasi agen hingga mencapai perubahan dengan perekrutan untuk memperoleh dukungan, meningkatkan partisipasi agen, serta menambah pengikut dalam gerakan komunitas lokal. Pada fenomena pemberdayaan ekonomi program BK-TKI, ketua kelompok melakukan perekrutan dengan mengajak agen untuk berpartisipasi supaya dapat melaksanakan pemberdayaan pada program. Menurut Wahyudi (2010), gerakan sosial memiliki strategi dalam mobilisasi partisipan atau agen yang berpartisipasi, strategi ini dilakukan dengan meyakinkan agen, mengajak agen, memperluas jaringan dan mengajak keluarga agen untuk berpartisipasi. Agen yang bergabung dalam gerakan atau organisasi menjadi penentu keberhasilan tindakan kolektif. TKI purna perempuan mengikuti paguyuban di Kabupaten Bantul dengan melaksanakan program kerja BP3TKI untuk mengelola remitansi dengan mengembangkan usaha, agen yang berpartisipasi berdasarkan kemampuan modal (ekonomi dan sosial), memberdayakan diri dan lingkungan, serta pengambilan keputusan (Setiadi, 2020).

Dalam fenomena masyarakat pesisir, keluarga PMI memiliki komponen kesempatan atau opportunity, agen berpartisipasi dengan membentuk kelompok pemberdayaan dan melakukan interaksi dengan pihak diluar tempat tinggalnya. Agen memperoleh kesempatan atau peluang dalam melakukan aktivitas produktif sehingga terjadi perubahan dalam menggunakan remitansi. Menurut Gultom dan Nugroho, (2020) , terdapat interaksi yang dihasilkan dalam pendampingan usaha oleh LP3TKI Kabupaten Blitar dengan PMI purna dan komunitas keluarga buruh migran. Masyarakat dengan latar belakang yang sama memperoleh kesempatan untuk mendapat wawasan wirausaha dengan pihak lembaga dan pemerintah daerah. Menurut Tilly (2004) , opportunity atau peluang atau kesempatan dapat melahirkan gerakan sosial atau organisasi. Hal ini dikarenakan agen berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan menimbulkan perubahan dalam diri agen sehingga terjadi gerakan sosial. Keluarga PMI wilayah pesisir KEK Mandalika saling berinteraksi dan menjalin relasi dengan pihak diluar kelompoknya, hal ini menghasilkan perubahan dalam pola penggunaan remitansi.

Menurut Juddi et al (2021), program perlindungan eks TKI di Kabupaten Cirebon memiliki strategi bottom up menghasilkan interaksi antara anggota eks TKI (anggota memiliki remitansi yang melimpah), pemerintah, dan keluarga eks TKI dengan komunikasi secara langsung dan media (pamflet, Grup WhatsApp, dan pertemuan), selain itu interaksi antara anggota kelompok dengan pemerintah menghasilkan minat bagi pengurus organisasi karena memperoleh uang setiap tiga bulan selama dua tahun. Agen yang berinteraksi dengan lingkungan sekitar seperti respon atas munculnya kebijakan pemerintah akibat realita atau permasalahan sosial yang ada di masyarakat dapat melahirkan gerakan sosial (Tilly, 2004). Dalam hal ini peluang atau kesempatan yang diperoleh agen melahirkan gerakan sosial respon dari adanya kebijakan pemerintah. Pada program BK-TKI Kabupaten Lombok Tengah, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Pasal 1 Tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia. Selanjutnya, kebijakan ini diimplementasi di beberapa titik di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan dibentuk program BK-TKI.

Kesempatan atau momentum yang diterima oleh masyarakat digunakan untuk melakukan produksi pengolahan kerupuk rumput laut dan produksi makanan khas Sasak, selain itu produksi kerajinan tangan wanita (dompet dan tas) dilakukan pada program ini. Hal ini dilakukan untuk mengalokasikan sebagian remitansi untuk usaha produktif. Hal ini sesuai dengan kondisi di India bahwa pengiriman remitansi digunakan untuk tujuan produktif, terdapat aktivitas yang menghasilkan keuntungan akibat pengiriman uang (remitansi) dari luar negeri (Sutradhar, 2020). Kesempatan yang digunakan oleh masyarakat TKI, TKI purna dan keluarganya untuk berkegiatan pemberdayaan ekonomi secara kolektif karena implementasi kebijakan BNP2TKI, selain itu latar belakang anggota dengan status mapan maka remitansi menjadi kesempatan/peluang untuk meningkatkan aset keluarga dengan wirausaha (Bareta & Ispriyoso, 2018). Dalam hal ini, peluang atau kesempatan atau momentum menuju perubahan sosial terjadi dalam organisasi akibat munculnya kebijakan pemerintah dan kondisi latar belakang ekonomi mapan atau stabil sehingga memicu tindakan kolektif.

Komponen terakhir, tindakan sosial, yaitu aksi atau tindakan yang berisi petunjuk untuk mencapai kepentingan agen atau anggota yang ditujukan untuk kelompok lain (Tilly, 1978). Tindakan sosial yang dilakukan masyarakat pesisir secara kolektif untuk mencapai tujuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam implementasi program BK-TKI dengan kegiatan pemberdayaan, hal ini ditujukan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat pesisir sebagai agen karena membentuk usaha produktif atau bisnis dengan mengelola remitansi secara bijak dan efektif. Selain itu, suami yang bekerja sebagai PMI tidak kembali menjadi migran kembali di periode selanjutnya. Hal ini sesuai dengan kondisi TKI, calon TKI, mantan TKI dan keluarganya tergabung dalam kelompok usaha produktif Desmigratif berpartisipasi dengan melaksanakan program dari pemerintah sehingga memperoleh penguatan kapasitas, dapat menggunakan remitansi, dan mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri (Karyati dan Adiwirahayu, 2018).

Tindakan kolektif merupakan petunjuk atau kebijakan yang diimplementasikan dalam bentuk tindakan/aksi secara kolektif (Tilly, 1977). Program ini dapat terlaksana apabila dilakukan secara bertahap, memiliki batasan dalam pelaksanaannya, dan memiliki tujuan yang ingin dicapai untuk kepentingan PMI dan keluarganya. Tilly menjelaskan bahwa tindakan kolektif adalah tindakan yang berkelanjutan secara bertahap berbentuk petunjuk atau kebijakan yang dilakukan oleh agen secara kolektif terhadap kepentingan orang lain (Rahman et al, 2018). Dalam hal ini, kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kebijakan ini berisi perlindungan ekonomi oleh pemerintah Indonesia untuk pekerja migran dan keluarga melalui pengelolaan remitansi oleh lembaga dan edukasi. Intervensi pemerintah dalam bidang ini adalah edukasi pengelolaan remitansi dan kewirausahaan untuk menjamin kesejahteraan (Ayuningtyas dan Yuniza, 2022). Oleh karena itu, purna migran dan keluarganya melaksanakan program kerja dari kebijakan pemerintah pusat untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Masyarakat pesisir yang tergabung dalam komunitas pemberdayaan bagi keluarga PMI melaksanakan program BK-TKI, agen atau anggota dapat meningkatkan status sosial dan ekonomi ketika suami bekerja menjadi PMI dan setelah selesai periode bekerja. Remitansi yang dikirim oleh PMI untuk keluarga dapat dikelola secara bijak sehingga mengurangi angka PMI yang kembali bekerja di luar negeri. Pengelolaan remitansi dilakukan oleh keluarga PMI dengan memiliki usaha produktif atau bisnis di rumah masing-masing. Hal ini dapat dilakukan karena agen telah menerima pengetahuan dari program yang merupakan wujud dari pelaksanaan pilar pertama yaitu pemberdayaan keluarga PMI. Program BK-TKI telah berhasil melakukan pilar pertama, hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan kegiatan/aktivitas

program yang rutin dilakukan tiap bulan oleh ketua BK-TKI Kabupaten Lombok Tengah dan sosialisasi/mentoring oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meskipun pelaksanaannya tidak rutin dilakukan oleh instansi, namun, telah membawa perubahan yang signifikan berupa peningkatan pemahaman mengenai kewirausahaan dan praktik pengelolaan remitansi untuk usaha produktif di rumah tangga/keluarga PMI. Pilar pertama program bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mengelola sumber daya laut, masyarakat menerima pelatihan produksi olahan potensi wilayah pesisir untuk produksi kerupuk rumput laut, dan pelatihan menjahit untuk produksi bros dan tas wanita. Program ini mengurangi resiko keretakan rumah tangga dan perilaku konsumtif karena keluarga PMI memiliki aktivitas di luar rutinitas domestik, mengelola remitansi dengan bijaksana, menjalin relasi dengan sesama anggota dan pihak terkait, memiliki akses dalam penggunaan remitansi, serta memiliki usaha produktif atau bisnis di rumah masing-masing. Hal tersebut dilakukan karena anggota komunitas atau keluarga PMI memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai kewirausahaan dari kegiatan sosialisasi, mentoring, pelatihan, dan pembinaan program kerja BK-TKI oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pendampingan rutin oleh ketua BK-TKI wilayah pesisir KEK Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan peneliti lain dapat menganalisis fenomena sosial mengenai pemberdayaan ekonomi atau fenomena sosial pada pilar-pilar lain pada program BK-TKI khususnya di wilayah KEK Mandalika Kabupaten Lombok Tengah, peneliti lain diharapkan mengeksplorasi realita sosial mengenai pengelolaan remitansi berbasis komunitas pada program BK-TKI dengan perspektif atau sudut pandang lainnya sehingga penelitian ini menjadi referensi untuk penelitian serupa lain yang lebih mendalam. Selanjutnya, masyarakat atau akademisi dapat mengetahui kondisi masyarakat pesisir khususnya keluarga PMI terkait perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan sektor sosial dan ekonomi. Penelitian-penelitian lain yang serupa akan berkontribusi bagi kehidupan masyarakat pesisir keluarga PMI dan program kerja BK-TKI sehingga membawa perubahan yang signifikan untuk kehidupan anggota menjadi berdaya dan sejahtera dalam aspek sosial dan ekonomi.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih untuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram yang telah memberikan pendanaan sebagai peneliti skim Penelitian Dosen Pemula, terimakasih untuk Program Studi Sosiologi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan tema "Permasalahan Sosial", Tim Penelitian bidang "Permasalahan Sosial", BK-TKI Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terimakasih untuk semua informan dan semua yang terlibat dalam membantu penelitian ini sehingga selesai dengan baik.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aemanah, U. (2017). Upaya Pemberdayaan Keluarga TKW Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rumah Tangga. *Empower* 4(1), 134-148. <http://doi.org/10.24235/empower.v4i1.4231>
- Ancelovici, M. (2021). Conceptualizing the context of collective action: an introduction. *Social Movement Studies*, 20(2), 125-138. <https://doi.org/10.1080/14742837.2021.1886503>
- Arifiartiningih. (2016). Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) Di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 11(1), 109-137. <https://doi.org/10.14421/jsr.v11i1.1275>
- Ayuningtyas, A., & Yuniza, M. E. (2022). Indonesian government intervention in the management of Indonesian migrant workers' remittances: Is it constitutionally justified? *Advances in Southeast Asian Studies*, 15(1), 5-21. <https://aseas.univie.ac.at/index.php/aseas/article/view/6237/7419>
- Aziz, M. K. (2022). Konsep Ketahanan Keluarga Masyarakat Lombok Tengah Sebagai TKI dan TKW. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(8), 2885-2897.
- Bachtiar, P., & Prasetyo, D. D. (2015). *TKI Purna dan Berbagai Program Reintegrasi di Indonesia*. Jakarta: The SMERU Research Institute, 1-22.
- Bareta, R. D., & Ispriyarso, B. (2018). Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 163-182. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9828>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Mixed Methods Procedures. In Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications Ltd.
- Cropley, A. (2023). *Qualitative Research Methods: A Practice-Oriented Introduction*. Hamburg: University of Hamburg.
- Gofe, T.E., Olana, D.R., & Debela, K.L. (2022). A Critical Review Of Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact Article In Science Research. *Science Research*,

- 10(5), 114–120. <https://doi.org/10.11648/j.sr.20221005.12>
- Gultom, E., O., B., & Nugroho, A. (2020). Implementasi Pendampingan Kegiatan Usaha Komunitas Keluarga Buruh Migran yang Diselenggarakan oleh LP3TKI di Kabupaten Blitar. *NOVUM : JURNAL HUKUM*, 7(2), 21–29. <https://doi.org/10.2674/novum.v7i2.31398>
- Habib, M. A. F., Anggraeni, U., & Nisa, K. K. (2021). Utilization of Migrant Workers' Revenues (Remittance) for the Family Economy. *Journal of Urban Sociology*, 4(1), 16-30. <https://doi.org/10.30742/jus.v4i1.1484>
- Juddi, M. F., Perbawasari, S., & Zubair, F. (2021). The Communication Flow in the Protection of Indonesian Female Migrant Workers through the Migrant Worker Family Community (KKBM). *Journal of International Women's Studies* 22(5), 19–37.
- Karyati, S., & Adiwirahayu, A. (2018). Strategi Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif Di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). *Angka Pekerja Migran Indonesia di Lombok Tengah Tinggi, KEMENPPPA Perkuat Pembinaan Keluarga*
- Khoirudin, R., Nurjannah, E., & Salim, A. (2023). Analisis Tenaga Kerja Migran Provinsi Nusa Tenggara Barat. *JURNAL ILMIAH MAKSITEK* 8(1). <https://makarioz.sciencemakarioz.org/index.php/JIM/article/view/362>
- Lampe, I. (2018). Pola Komunikasi Gerakan Sosial Komunitas Sekitar Tambang Migas Tiaka: Refleksi Identitas Etnik Lokal. *Jurnal ASPIKOM*, 3(5), 860-873. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i5.334>
- Miles, M. B., Huberman, M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*. USA: SAGE Publication. <https://doi.org/10.7748/ns.30.25.33.s40>
- NTB Satu Data. Penempatan Pekerja Migran Indonesia Menurut Kabupaten / kota Tahun 2023. *Laporan Penempatan PMI Ke Luar Negeri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023*. Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Nurchayati, N. (2010). *Foreign Exchange Heroes or Family Builders? The Life Histories of Three Indonesian Women Migrant Workers*. Faculty of the Center for International Studies of Ohio University.
- Octaviani, L. (2015). Pemanfaatan Remitansi Ekonomi Dan Sosial Di Kalangan Buruh Migran Perempuan (Studi Kasus: Desa Penggalang dan Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah). *FIS* 42(1), 57–69. <https://doi.org/10.15294/fis.v42i1.9245>
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Panduan Umum Bina Keluarga TKI
- Puri, S., & Ritzema, T. (1999). Migrant Worker Remittances, Micro-finance and the Informal Economy: Prospects and Issues. *Working Paper of Social Finance Unit* 21, 1-36. https://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Publications/WCMS_117997/lang--en/index.htm
- Puspawati, A. A. (2019). Gap Implementasi Kebijakan Bina Keluarga TKI di Kabupaten Malang. *Publik* 02(02), 115-122. <https://wacanapublik.stisipoldharmawacana.ac.id/index.php/politik/article/view/26>
- Rahman, A., Slamet, Y., & Haryono, B. (2018). Dinamika Gerakan Sosial Masyarakat Samarinda dalam Memperjuangkan Keadilan Lingkungan (Studi Kasus Pada Gerakan Samarinda Menggugat Di Kalimantan). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 7(1), 127–140. <https://doi.org/10.20961/jas.v7i1>
- Saleh, R., Adnan, R. S., & Raharto, A. (2022). Pemberdayaan komunitas purna Pekerja Migran Indonesia melalui organisasi berbasis komunitas Forum Warga Buruh Migran. *Jurnal Kependudukan Indonesia* 17(2), 219-236. https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/754/pdf_1
- Setiadi. (2020). Paguyuban sebagai Media Transformasi Sosial-ekonomi Keluarga Perempuan TKI Purna Penempatan? Sebuah Perspektif Antropologi Migrasi. *Populasi* 28(1).
- Sjafirah, N. A., Sjuhro, D. W., Nasriah, H., & Rukmana, E. N. 2021. Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna oleh BP3TKI provinsi Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Komunikasi* 6(1), 66-85. <https://jurnal.unpad.ac.id/manajemen-komunikasi/article/view/30918>
- Suryadi., Kasturi., & Yusmanto. (2022). Pekerja Migran Indonesia dan Potensi Masalah Keluarga yang Ditinggalkan (*Family Left-Behind*). *Empower*7(1), 126–141. <http://doi.org/10.24235/empower.v7i1.10408>
- Sutrardhar, S. R. (2020). The Impact of Remittances on Economic Growth In Bangladesh, India, Pakistan and Sri Lanka. *International Journal of Economic Policy Studies* 14, 275–295. <https://doi.org/10.1007/s42495-020-00034-1>
- Tilly, C. (1977). *Studying Social Movements/Studying Collective Action*. Center for Research on Social Organization of University of Michigan.
- Tilly, C. (1978). *From Mobilization to Revolution*. New York: Random House.

- Tilly, C. (1985). Models and Realities of Popular Collective Action. *Social Research* 52(4), 717-747. <https://www.jstor.org/stable/40970396>
- Tilly, C. (2004). *Social Movements 1768-2004*. Boulder: Paradigm Publishers.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2013). *Maximizing the Development Impact of Remittances*. Geneva: United Nations.
- Utami, T. K. (2018). Law Protection for Indonesian Migrant Workers Family in Cianjur District. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), 156. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.1361>
- Wahyudi. (2010). Formasi Dan Struktur Gerakan Sosial Petani [Studi Kasus Gerakan Reklamasi/ Penjarahan Atas Tanah PTNP XII (Persero) Kalibakar, Malang Selatan. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 12(1), 19-42. <https://doi.org/10.14203/jmb.v12i1.162>
- Wijaya, O. H., & Setiyono, B. (2020). Perlindungan Pekerja Migran Dari Perspektif Community Development (Studi Kasus Desa Nyerot Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah Prov. Nusa Tenggara Barat). *Journal of Politic and Government Studies*, 9(03), 51-60.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research - Design and Methods (6th ed.)*. Los Angeles: Sage Publications.
- Yuliani, D., & Rasalwati, U. H. (2020). Wellbeing Condition of International Migrant Workers From Indonesia Who Worked in Malaysia: Study on International Migrant Workers Family in Krangkeng Sub-District Indramayu Regency West Java Province Indonesia. *Indonesian Journal of Social Work*, 3(2), 147-159. <https://doi.org/10.31595/ijsw.v3i2.229>
- Yuniarto, P. R. (2019). Indonesian Return Migrants Entrepreneurship at Home Village: Knowledge Production and Living Strategy. *Jurnal Kependudukan Indonesia* 13(2), 89-102.
- Zheng, C., & Musteen, M. (2018). The Impact of Remittances on Opportunity-Based and Necessity-Based Entrepreneurial Activities. *Academy of Entrepreneurship Journal* 24(3), 1-13.
- Zulkifli, R. A., Nurdinawati, D., & Wahyuni, E. S. (2020). Gender Dan Alokasi Pemanfaatan Remitan Dalam Rumah Tangga Migran TKI Laki-Laki. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(2), 195-206. <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.2.195-206>